ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang mobilisasi santri dalam PKNU "Partai Kebangkitan Nasional Ulama" di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Pileg "Pilihan Legislatif" 2009. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan santri dalam PKNU pada Pileg 2009.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *Field reseach* (penelitian lapangan). Adapun tentang metode pengumpulan data yang digunakan adalah *in depth interview* (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi. Sedangkan teori yang dipakai adalah teori fenomenologi, konstruksi sosial dan teori mobilisasi politik.

Temuan peneliti ini tentang teori fenomenologi yakni memberikan peluang untuk aktor, yang dimaksud aktor disini adalah seorang kiai yang sudah melibatkan santrinya, dengan alasan pondok pesantren *Mambaus Sholihin* sebagai sorotan pertama oleh para ulama' pendiri PKNU, sedangkan teori konstruksi sosial memberikan pendekatan kepada santri yang di mobilisasi oleh kiainya secara langsung seperti; H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq. Dan teori mobilisasi politik santri sendiri di gunakan untuk santri yang tidak mendukung adanya PKNU.

Dengan ini kiai melibatkan santri dengan proses kiai melihat karakteristik dari beberapa santri yang di pandang kiai bisa untuk sebagai pemimpin, kiai pun melihat tanggung jawab seorang santri ketika santri ini menjadi pengurus pondok pesantren *Mambaus Sholihin*. Setelah kiai melihat betapa besar tanggung jawab santri menjalani amanat. Dari proses inilah kiai secara langsung menunjuk santrinya untuk di mobilisasi dalam PKNU. Dan tujuan politik santri bukan untuk menyalurkan menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti halnya dalam dunia politik seorang santri bisa memberi kesadaran baru yang bersifat positif pada masyarakat. Politik juga melatar belakangi santri yang mengklaim dirinya untuk mewakili mayoritas suara rakyat, guna untuk memperkuat agama Islam. Disinilah santri pondok pesantren *Mambaus Sholihin* yang sedang menjalankan amanat dari seorang guru

Kata Kunci: Kiai dan Partai Politik